**A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF INHERITANCE
DISTRIBUTION OF THE PUSAKO RANDAH PROPERTY IN LUBUK
BASUNG VILLAGE IN THE MINANGKABAU CUSTOMARY
ENVIRONMENT OF WEST SUMATRA**

Fika Yasha Putri¹, Ahmad Eddison², Jumili Arianto³

fika.yashaputri@gmail.com¹, ahmadeddison@lecturer.unri.ac.id², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No. Hp : 085374042963

*Pancasila and Citizenship Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research is motivated by the problem of inheritance distribution of pusako randah property in Lubuk Basung village which is in contrast to the collective inheritance distribution system for high pusako assets in the Minang indigenous community, whose inheritance rights are owned by heirs based on maternal or female lineage. In addition, it also contradicts the matrilineal kinship of the indigenous peoples in Minang where women are considered more dominant and are the successors of a family lineage. The formulation of the problem in this research is how is the implementation of inheritance distribution of pusako randah property in Lubuk Basung Kenagarian in the Minangkabau customary environment of West Sumatra. West. In processing the data the researchers used a qualitative method, the population in this study were some of the people in the Kenagarian Lubuk Basung with a sample that the researchers took was 5 people who were taken from traditional elders / ninik mamak and also community leaders in the Lubuk Basung Kanagarian. The data analysis technique used in this study is based on several opinions from respondents or using words. In qualitative data analysis, according to Miles and Huberman, it is carried out interactively through a process of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data collection techniques used are interview, observation, and documentation methods. Based on the results of research conducted by researchers in the field, the implementation of the distribution of the inheritance of the Minangkabau community tends to apply the Islamic heritage system but in practice the distribution is carried out on the basis of the principles of deliberation and consensus, where the distribution is carried out equally. This is because the community's soul likes to deliberate in determining a decision and in order to maintain family harmony so that there is no dispute or friction between the heirs.*

Key Words: *Distribution Inheritance, Property Pusako Randah.*

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PUSAKO RANDAH DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT

Fika Yasha Putri¹, Ahmad Eddison², Jumili Arianto³

fika.yashaputri@gmail.com¹, ahmadeddison@lecturer.unri.ac.id², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Nomor HP : 085374042963

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pembagian warisan atas harta pusako randah di kenagarian lubuk basung yang bertolak belakang dengan sistem pembagian harta warisan kolektif atas harta pusako tinggi pada masyarakat adat minang, yang hak warisannya dimiliki oleh ahli waris berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan. Selain itu juga bertentangan dengan kekerabatan matrilineal pada masyarakat adat di minang dimana perempuan dianggap lebih dominan dan merupakan penerus garis keturunan dari sebuah keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan atas harta pusako randah di Kenagarian Lubuk Basung dalam lingkungan adat Minangkabau Sumatera Barat serta Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan atas harta pusako randah di kenagarian Lubuk Basung dalam lingkungan adat Minangkabau Sumatera Barat. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode kualitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu sebagian masyarakat yang ada di Kenagarian Lubuk Basung dengan sampel yang peneliti ambil berjumlah 5 orang yang di ambil dari tetua adat/ ninik mamak dan juga tokoh masyarakat yang ada di kanagarian lubuk basung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada beberapa pendapat dari responden atau menggunakan kata-kata. Dalam analisis data kualitatif Menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan . Adapun teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat minangkabau lebih cenderung menerapkan sistem warisan islam tetapi praktiknya pembagian dilakukan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat, dimana pembagiannya dilakukan secara sama rata. Hal tersebut dikarenakan jiwa masyarakat yang suka bermusyawarah dalam menentukan sesuatu keputusan dan demi menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perselisihan atau gesekan di antara ahli waris.

Kata Kunci : Pembagian warisan, hartapusako randah.

PENDAHULUAN

Indonesia mengenal dengan tiga sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Sudah kita ketahui pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam suatu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda. (Helmi Panuh, 2012)

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Di dalam hukum kewarisan pada masyarakat suku minangkabau dikenal dengan adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencarian). Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal-usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut. Harta pusaka tinggi diwariskan secara turun temurun terhadap suatu kaum. Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi maka ahli warisnya ialah anggota-anggota yang dilihat dari garis keturunan ibu (matrilineal). Selain itu pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan suku minangkabau (adat). Jika yang dibicarakan tentang harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu akan diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.

Harta pusaka rendah (harta pencarian) berasal dari pencarian suami dan istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris secara ilmu faraid, (ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui dengan siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga beberapa ukuran untuk setiap ahli waris). Harta Pencarian tersebut dapat terdiri dari harta yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan seperti perhiasan, mobil, rumah dan lain-lain. Dan yang merupakan barang-barang tetap seperti sawah dan ladang.

Di dalam bidang pewarisan pada masyarakat minangkabau yang dipengaruhi oleh hukum islam sangat kental dan tampak nyata. Meskipun cara pewarisan masyarakat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangatlah bertolak belakang dengan kewarisan islam yang pembagiannya berdasarkan pada garis kebabakan atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencarian pada masyarakat Minangkabau, dapat kita lihat dalam lingkungan pengadilan, baik dalam pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dalam pewarisan harta pencarian dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi siapa yang menerima harta warisan dan dari segi bagaimana cara kepemilikannya.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari selasa 24 desember 2019 pukul 10.40 wib, dengan Novi Endri DT. Simarajo selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung sistem pembagian harta warisan terhadap harta

pusako randah yang berupa harta pencaharian pada masyarakat suku adat Minang dewasa ini adalah dengan menurut ketentuan hukum islam. Apabila ada perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang di selesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, maka Kerapatan Adat Nagari akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum islam sesuai dengan falsafah *adaik basandi syara, syara basandi kitabullah* tersebut. (wawancara Novi Endri DT. Simarajo,2019)

Pembagian warisan terhadap *harta pusako randah* yang berupa harta pencaharian bertolak belakang dengan sistem pembagian harta warisan kolektif atas *harta pusako tinggi* pada masyarakat hukum adat Minang, yang hak warisannya dimiliki oleh ahli waris berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan. Selain itu juga bertentangan dengan sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat hukum adat di Minang di mana perempuan dianggap dominan dan merupakan penerus garis keturunan dari sebuah keluarga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah judul mengenai “*Studi Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pusako Randah Di Kenagarian Lubuk Basung Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Sumatera Barat*”. Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan atas harta pusako randah di Kenagarian Lubuk Basung dalam lingkungan adat Minangkabau Sumatera Barat?”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Husein Umar,2011). Dengan demikian maka populasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang ada di Kenagarian Lubuk Basung. Berdasarkan populasi tersebut maka untuk menentukan jumlah sampel penulis menggunakan teknik probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampling. Teknik probability sampling yang digunakan adalah cluster sampling (area sampling) yaitu sampling menurut daerah. Dengan demikian untuk memperkuat sumber data dari sampling diatas maka peneliti menggunakan teknik pengambilan dan penentuan sampling yaitu *purposive sampling* yakni pengambilan atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang ingin dijadikan responden tersebut diyakini mengetahui, memahami, akan informasi ataupun data yang ingin didapatkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2014) Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti mengambil sampel sebanyak 5 orang, yang berdasarkan pada pendapat Sugiyono bahwa peneliti diperbolehkan untuk memilih sampel yang diinginkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi Observasi dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui “Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pusako Randah Di Kanagarian Lubuk Basung Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Sumatera Barat”, maka peneliti turun langsung mengamati kondisi masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini yaitu suatu bentuk Tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, pendapat, fakta dan bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa. Teknik wawancara yang

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara langsung untuk mengetahui secara langsung Bagaimanakan Studi Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pusako Randah Di Kenagarian Lubuk Basung Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Sumatera Barat kepada responden yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada beberapa pendapat dari responden atau menggunakan kata-kata. Dalam analisis data kualitatif Menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verification (penarik kesimpulan) serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya bisa valid. (Sugiyono, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan atas harta *pusako randah* dalam lingkungan adat minangkabau sumatera barat di kenagarian lubuk basung sumatera barat.?

Ahli waris pada masyarakat adat minangkabau untuk harta pusaka rendah sama halnya dengan hukum waris islam atau faraidh, yang menurut hukum islam atau faraidh pembagian warisan kepada anak laki-laki maupun perempuan berbeda. Bila dalam perbandingannya laki-laki dua dan perempuan satu. Artinya dimana perempuan akan mendapatkan setengah dari laki-laki. Namun dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil yang berbeda-beda dimana tidak semua masyarakat yang ada di Kenagarian Lubuk Basung yang melakukan pembagian warisan menurut hukum islam atau faraidh, dan ada juga masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan cara membagi sama rata.

Pertama, Ahli waris yang pembagian warisannya berdasarkan hukum islam yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan hak warisan lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dimana pembagian warisan laki-laki dan perempuan itu dua berbanding satu. Dalam penelitian ini terdapat dua orang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum kewarisan islam yaitu seperti yang dilakukan oleh bapak Abdul Khadir bahwa :

wawancara peneliti bersama dengan narasumber bapak **Abdul Khadir** (35 tahun yang di wawancarai pada tanggal 12 Oktober 2020) selaku masyarakat yang pernah membagi warisan dan sebagai guru agama di salah satu sekolah yang ada di Kenagarian Lubuk Basung, bapak ini mengemukakan bahwa "harta *pusako randah* ini yaitu harta yang di dapat dari pencaharian kedua orang tua, jadi dalam melakukan pembagian warisan saya melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum islam".

Berdasarkan hasil wawancara bersama responden di atas bahwa mereka melaksanakan pembagian warisan harta *pusako randah* berdasarkan hukum kewarisan islam atau hukum faraidh.

Kedua, Dalam pembagian warisan sama rata semua ahli waris mendapatkan warisan tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sama halnya seperti yang di lakukan oleh beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai seperti ;

Wawancara bersama bapak *St. Makmur* (65 tahun pada 12 Oktober 2020) selaku kepala adat (datuak), ia mengatakan bahwa “berdasarkan hasil musyawarah mufakat para cendikia orang minang di bukit marapolam *pusako randah* dalam pelaksanaan pembagiannya itu di bagikan sama rata”.

hasil wawancara bersama narasumber diatas maka dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya dibagikan berdasarkan hukum islam namun adapula sebagian masyarakat yang membagikan warisan kepada anak-anaknya dengan sistem musyawarah yang dimana pembagian warisan harta *pusako randah* itu dibagikan sama rata tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber diatas maka dapat kita ketahui di dalam pembagian warisan harta *pusako randah* di Minangkabau tepat nya di Kenagarian Lubuk Basung bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan nya itu di bagikan melalui ketentuan hukum kewarisan islam, namun tidak sedikit masyarakat yang membagikan warisan melalui musyawarah mufakat dengan membagikan warisan tersebut secara sama rata tanpa adanya perbedaan sedikitpun tujuan dibagikannya secara sama rata ialah agar masyarakat di sana tidak terjadi perselisih paham man yang terjadi akibat warisan tersebut.

2. Apakah perbedaan atau perbandingan hukum kewarisan islam dengan pewarisan harta *pusako randah* di Minangkabau..?

Dalam pembahasan kali ini dapat kita bahas perbandingan yang ada antara kewarisan islam dengan pewarisan harta *pusako randah* yang ada di Minangkabau tepatnya di Kenagarian Lubuk Basung.

Pertama, apabila kita lihat dari jenis harta tersebut dalam adat minangkabau dan kewarisan islam yaitu , dalam adat minangkabau harta tersebut terbagi dua yaitu: harta *pusako tinggi* yang sumbernya diperoleh dari nenek moyang yang di wariskan secara turun temurun yang sifatnya tidak dimiliki oleh seseorang melainkan harta tersebut dimiliki oleh semua kaum yang ada dalam keluarga tersebut.*kedua*, harta *pusako randah* yaitu harta yang sumbernya dari pencaharian/ usaha kedua orang tua selama berjalannya perkawinan. Sedangkan dalam kewarisan islam harta tersebut adalah harta yang dimiliki oleh si pewaris baik yang bersumber dari harta bawaan atau maupun yang berasal dari harta gono gini (harta bersama).

Kedua, apabila kita lihat dari sumber harta warisan maka dapat kita ketahui bahwa dalam adat minangkabau dan hukum islam terdapat perbedaan yang sangat mendasar, jika di lihat dalam adat Minangkabau harta tersebut terbagi menjadi dua yaitu harta yang diperoleh dari nenek moyang secara turun temurun dan harta yang di dapat dari hasil pencaharian sendiri. Sedangkan dalam hukum islam harta tersebut didapat dari harta bawaan si pewaris dan harta

gono gini (harta bersama) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga ketika ia sudah menikah.

Perbedaan atau perbandingan dalam penelitian ini dapat di lihat dari beberapa hasil wawancara bersama narasumber yang mengatakan bahwa:

Menurut bapak St. Makmur 65 tahun pada tanggal 12 Oktober 2020, mengatakan bahwa dalam perbandingan antara kewarisan islam dengan pewarisan harta pusako randah di nagari Lubuk Basung dimana dalam pembagian harta pusako randah dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara membagi sama rata harta tersebut, sedangkan dalam kewarisan islam pembagiannya $\frac{2}{3}$ untuk laki-laki dan untuk perempuan separo dari anak laki-laki.

Menurut Muklis (30 tahun) 10 Oktober 2020, mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya ada dimana di dalam adat pembagian harta *pusako randah* artinya harta yang didapat oleh kedua orang itu dibagikan kepada anak perempuan, kalau di dalam kewarisan islam itu dibagikan kepada laki-laki-
maupun perempuan.

Menurut Abdul kadir (35 tahun), tanggal 12 Oktober 2020 mengatakan bahwa di dalam harta pusako randah ini tidak ada perbandingan karena pembagiannya sesuai dengan islam.

Dapat kita ketahui bahwa jika dalam pembagian kewarisan harta berdasarkan hukum islam, bahwasannya laki-laki lebih banyak mendapatkan di bandingkan dengan perempuan dan jika di lihat dari adat minangkabau harta itu sendiri di bagikan berdasarkan musyawarah yang dimana harta warisan dibagikan sama rata tanpa adanya perbandingan.

3. Kendala apa saja yang timbul di dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta *pusako randah* di Kenagarian Lubuk Basung ?

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya pada masyarakat minangkabau tidak semuanya melakukan pembagian warisan melalui hukum islam namun pada kenyataannya sekarang ini sebagian masyarakat minangkabau melakukan pembagian warisan dengan membagi sama rata. Kendala yang di timbulkan pun menurut masyarakat sekitar berbeda-beda sebagian masyarakat ada yang mengatakan tidak ada kendala yang di timbulkan, dapat kita lihat dari narasumber berikut ini :

St. Makmur (65 tahun) 12 Oktober 2020, kendalanya itu tergantung kepada mamak mereka sendiri, misalnya saya penghulu itu sendiri jadi saya yang menyampaikan kepada anak kemenakan nya bahwa harta pusako randah itu di bagi sama banyak tidak sama dengan pembagian dalam islam.

Abdul kadir (35 tahun) 12 Oktober 2020, kendala yang ada dalam pelaksanaannya ini yaitu karena kurangnya pengetahuan mengenai pembagian harta pusako randah ini.

4. Upaya apasaja yang dilakukan untuk mengatasi gejala yang timbul ?

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di timbulkan didalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta *pusako randah* adalah sebagai berikut:

1. Dengan cara memberikan penyuluhan atau pembinaan agama kepada masyarakat supaya masyarakat tau dan faham tentang bagaimana semestinya harta *pusako randah* itu dibagikan agar nantinya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ada. berdasarkan hasil wawancara bersama dengan beberapa narasumber ;

Bapak Abdul Kadir mengatakan bahwa harus dilakukannya pembinaan agama untuk masyarakat supaya tahu bagaimana saja cara pelaksanaan pembagian warisan ini serta peran penting mamak adat sangatlah di perlukan untuk membimbing anak kemenakan dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembagian warisan tersebut.

Sependapat dengan bapak Muklis yang mengatakan bahwa pewarisan itu di lakukan dengan syariat islam atau hukum islam jdi biar tidak ada kendala yang di timbulkan jdi upaya yang di lakukan yaitu dengan melakukan pembinaan agama.

berbeda halnya dengan pendapat dari wawancara peneliti bersama dengan bapak St. Makmur bapak ini mengatakan bahwa dalam mengatasi kendala yang ada ninik mamak harus memberitahu kepada anak kemenakan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta pusako randah ini harus di bagikan sama rata agar nantinya tidak terjadi kesalah fahaman.

Wawancara bersama dengan narasumber hidayati mazwar yang mengatakan bahwa dengan dibagikan sama rata harta tersebut jadi jika terjadi kendala maka ninik mamak harus memberikan arahan dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Mengadakan seminar dan penyuluhan dalam waktu yang sudah di jadwalkan mengenai pembagian warisann atas harta *pusako randah* ini baik untuk orang-orang yang selalu berhubungan dengan pembagian warisan ini maupun terhadap masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai hal tersebut. Sehingga masyarakat Minangkabau islam benar-benar dapat mengetahui dan mengerti bahwa dalam pewarisan harta sudah memasuki ajaran Hukum Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat minangkabau.(Ria Agustar, 2008)

PEMBAHASAN

Diikaitkan dengan hasil penelitian diatas dapat kita ketahui studi tentang pelaksanaan pembagian warisan harta pusako randah dikenagarian lubuk basung dalam lingkungan adat minangkabau sumatera barat.

Pusako (pusaka) atau harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materiil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. Yang termasuk pusaka di sini adalah: sawah ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, mesjid atau langgar (surau), peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pusaka

ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di dusun dan nagari.

Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, harta pusaka sebagai milik bersama (kolektif) tidak jarang pula menjadi 'biang keladi' dalam menimbulkan perselisihan dan sengketa dalam keluarga Minangkabau. Kepemilikan kolektif dapat dalam bentuk *sumande* atau se-Ibu (dalam bentuk *ganggaman bauntuak*), sejurai, seperut (*saparuik*), sesuku, sengari.

Harta pusaka di Minangkabau terbagi dua, yaitu *pertama*, harta pusaka Tinggi yaitu harta yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama-tama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut. *Kedua*, Harta pusako rendah merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak atau ibuk kita (orang tua) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak kepada kemenakannya dari hasil pencaharian mamak itu sendiri. Harta pusaka rendah ini merupakan calon atau cadangan dimasa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Harta pusaka rendah menurut garis adat, setelah ia meninggal dunia nanti (si bapak maka harta ini di bagi dua antara kaum sibapak dengan pihak yang menyelenggarakan atau membantu mencari (istri/anak), sebab badan yang mencari itu ialah milik kaumnya, sebagai modal dasar, dibantu oleh anak dan istrinya, sehingga laba dibagi dua antara pemilik modal dengan yang mengusahakannya. Hal ini setelah adanya kesepakatan ninik mamak dengan kaum paderi yang melahitirkan filosofi; *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Adat Bersendikan Syarak/agama, dan syarak bersendikan kitabullah/Al-Quran). Serta seminar hukum adat di penghujung tahun 1959 di padang, maka harta pencaharian suami istri (harta pusaka rendah) di atur menurut hukum faraidh (hukum islam), dimana harta pencaharian jatuh kepada anak-anaknya beserta segenap ahli warisnya yang lain, sedangkan harta pusaka tinggi di atur menurut Hukum Adat Minangkabau. (Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2010).

Menurut masyarakat setempat harta pusako rendah yaitu harta yang didapat dari hasil usaha atau hasil pencarian kedua orang tua. Harta pusako rendah ini berupa warisan yang baru saja diturunkan dari satu generasi saja. Hukum adat mengatakan Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. (Hilman Hadikusuma, 2003). Dalam adat minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Asas- asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatan Minangkabau adalah asas Unilateral dan asas kolektif. Asas unilateral yang kewarisannya berdasarkan pada satu garis keturunan, yaitu garis keturunan kekeluargaan ibu (Matrilineal), dan harta warisannya diturunkan dari nenek ke ibu lalu ke cucu perempuan. Asas kolektif yang berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi secara bersama- sama, tidak dapat dibagi kepemilikannya tetapi hanya penggunaannya yang dapat dibagi. Sistem kewarisan di Minangkabau menganut sistem kewarisan kolektif.

Ada pula hasil penelitian yang sependapat dengan penelitian terdahulu dari (Fakhrul Fahmi, 2020) yang mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat minangkabau lebih cenderung menerapkan sistem warisan islam tetapi praktiknya pembagian dilakukan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat, dimana

pembagiannya dilakukan secara sama rata. Hal tersebut dikarenakan jiwa masyarakat yang suka bermusyawarah dalam menentukan sesuatu keputusan dan demi menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perselisihan atau gesekan di antara ahli waris. Masyarakat adat dalam pembagian harta warisan mengalami pergeseran, masyarakat lebih cenderung memilih sistem waris hukum islam dalam pembagian harta warisan daripada sistem waris hukum adat. Walaupun pembagiannya dalam praktek lapangan tidak sesuai dengan hukum islam yaitu dengan dibagi sama rata. Pergeseran tersebut didasari atas prinsip “ dimana bumi di pijak disitulah langit dijunjung”. Yang bermakna di mana masyarakat itu berdomisili maka peraturan di domisili itulah peraturan harus ditaati, yaitu dengan menaati hukum islam.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang judul diatas, maka pelaksanaan pembagian warisan atas harta pusako randah di kenagarian lubuk basung yang dapat penulis simpulkan yaitu:

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat minangkabau lebih cenderung menerapkan sistem warisan islam tetapi praktiknya pembagian dilakukan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat, dimana pembagiannya dilakukan secara sama rata. Hal tersebut dikarenakan jiwa masyarakat yang suka bermusyawarah dalam menentukan sesuatu keputusan dan demi menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perselisihan atau gesekan di antara ahli waris.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan guna perbaikan dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Bagi para tokoh adat yang ada di Kenagarian Lubuk Basung, harus lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang adat istiadat terutama tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan harta pusako randah agar generasi muda dapat mengetahui dan melestarikan serta mengikuti aturan yang ada di wilayah itu.
2. Bagi para masyarakat dan generasi muda khususnya harus memahami dan menjalankan adat yang ada sebagaimana mestinya agar suatu saat nanti tidak terjadi selisih faham, dan seperti apa adat yang berlaku di lingkungan kita.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut dan membantu

dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahdum, M.Pd selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, selaku ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Pd, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Bapak Drs. Ahmad Eddison, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan masukan, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberi masukan, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Bapak Dr. Hambali M.Si, Bapak Supentri, M.Pd, dan Bapak Haryono, M.Pd, yang telah membantu memberikan masukan, membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (Bapak Drs. Zahirman, M.H), (Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H), (Bapak Dr. Hambali M.Si), (Bapak Supentri, M.Pd), (Bapak Haryono, M.Pd), (Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si), (Bapak Separen, S.Pd), (Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si), (Bapak Indra Primahadhani, M.H), (Bapak Mirza Hardian, M.Pd), (Ibu Hariyanti, S.Pd, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bakal dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Seluruh Aparatur Desa, beserta seluruh masyarakat di Kenagarian Lubuk Basung yang telah memberikan banyak bantuan dan doa dalam segala hal yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kepada kedua orang tua Ayahanda Muhammad Ilyas dan Ibunda Sofia Yulianti yang telah membesarkan, mendoakan, serta membantu baik secara materil dan non-materil serta selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga saat ini.
10. Pihak- pihak lain yang berperan dalam membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison. Nasrun Dt. Marajo Sungut.2010. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia,
- Fakhrul fahmi.2020” *Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Balingka Kabupaten Agam*.Skripsi. Universitas Andalas, padang
- Hilman Hadikusuma.2003.*Hukum Waris Adat*.PT. Citra Aditya Bakti.Bandung
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Avabeta CV. Bandung.
- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Bandung: Alfabeta.